

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka mendukung pembangunan dan tata kelola desa, salah satunya adalah melalui kebijakan pemekaran desa. Kebijakan pemekaran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Jakarta, 2014) yang menyebutkan bahwa desa memiliki peran penting sebagai unit pemerintahan terkecil yang berperan langsung dalam memberikan pelayanan publik dan mendorong pembangunan di tingkat lokal. Undang-undang tersebut memberikan wewenang bagi desa untuk mengelola urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk mengatur kebijakan pemekaran desa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan dan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pemekaran desa diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, terutama dalam mempercepat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Salah satu contoh penerapan kebijakan ini adalah pemekaran Desa Persiapan Pucak Mulyo yang terletak di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Desa Persiapan Pucak Mulyo, (Ponorogo, 2023) yang mengatur tentang pembentukan desa baru sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat setempat akan pelayanan yang lebih dekat, efektif, dan efisien. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat otonomi desa, dan mengoptimalkan peran desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Desa Persiapan Pucak Mulyo bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Sebagai desa yang baru dibentuk, Desa Persiapan Pucak Mulyo diharapkan mampu mengelola kewenangan pemerintahan secara mandiri, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran. Namun, meskipun pemekaran desa ini memiliki tujuan yang positif, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar tujuan pemekaran dapat tercapai. Pemekaran sering kali membawa perubahan signifikan pada struktur dan mekanisme pemerintahan desa yang memerlukan penyesuaian dalam tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, serta infrastruktur pendukung lainnya. (Supraptini, 2022)

Tantangan utama dalam pemekaran Desa Persiapan Pucak Mulyo adalah membangun efektivitas tata kelola pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa dengan baik. (Baharuddin, 2019) Tata kelola pemerintahan yang efektif sangat penting agar pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Sebagai desa baru, Desa Persiapan Pucak Mulyo harus membangun struktur pemerintahan yang memadai, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan dalam mengelola sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan kapasitas perangkat desa, terutama dalam hal keterampilan administratif dan tata kelola pemerintahan, dapat menghambat efektivitas pelayanan yang seharusnya semakin baik dengan adanya pemekaran. (Heldy Vanni Alam, 2017)

Selain itu, kebijakan pemekaran ini juga berpengaruh besar terhadap proses dan hasil pembangunan di Desa Persiapan Pucak Mulyo. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Jakarta, 2014) disebutkan bahwa desa memiliki hak untuk mengelola dan mengatur pembangunan sesuai dengan prioritas lokal demi mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya pemekaran, Desa Pucak Mulyo

diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran desa untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi pembangunan ini juga menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Desa Persiapan Pucak Mulyo masih memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Di samping potensi yang dimiliki, Desa Persiapan Pucak Mulyo juga menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pasca pemekaran. Kendala pertama adalah terkait dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa. Sebagai desa baru, Desa Persiapan Pucak Mulyo membutuhkan perangkat yang terlatih dan memahami tata kelola pemerintahan secara efektif. Namun, keterbatasan SDM yang berkompeten dapat menjadi kendala dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan dan pembinaan lanjutan bagi perangkat desa agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa secara tepat dan akuntabel. (Lestari, 2023)

Kendala kedua adalah terkait dengan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2023, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Desa Persiapan Pucak Mulyo mampu mengelola pemerintahan secara mandiri sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu melakukan pembinaan secara berkala, memberikan pendampingan administratif, serta memastikan bahwa perangkat desa mematuhi prosedur dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program. (Romadhon, 2022) Namun, keterbatasan jumlah petugas pembinaan serta jarak geografis yang cukup jauh dari pusat kabupaten menjadi kendala dalam memastikan pembinaan yang optimal bagi desa-desa baru seperti Desa Persiapan Pucak Mulyo.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di desa yang baru dimekarkan ini.(Wahyuningsih et al., 2022) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran desa guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi, sebagai desa baru, Desa Persiapan Pucak Mulyo sering kali masih terbatas dalam hal alokasi anggaran pembangunan, terutama untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan desa, balai desa, dan fasilitas kesehatan. Desa ini harus menyusun prioritas yang tepat dalam mengalokasikan anggaran pembangunan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara bertahap. Keterbatasan anggaran ini dapat menghambat proses pembangunan yang diharapkan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat Desa Persiapan Pucak Mulyo.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini sangat diperlukan untuk menganalisis dampak kebijakan pemekaran Desa Persiapan Pucak Mulyo terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa, serta untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi pasca pemekaran. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan pemekaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Jakarta, 2014) dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2023.(Ponorogo, 2023) Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam memperbaiki kebijakan pemekaran di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa permasalahan muncul seiring dengan pemekaran Desa Persiapan Pucak Mulyo. Proses pemekaran ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan lokal dan pembangunan desa. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemekaran Desa Persiapan Pucak Mulyo berpengaruh terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan desa?
2. Bagaimana pemekaran Desa Persiapan Pucak Mulyo memengaruhi proses serta capaian pembangunan desa di wilayah Baosan Kidul?
3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa Persiapan Pucak Mulyo setelah pemekaran?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh pelaksanaan pemekaran Desa Persiapan Pucak Mulyo terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam aspek administrasi, pelayanan publik, serta koordinasi antara aparatur desa dan masyarakat dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang lebih optimal.
2. Menjelaskan secara mendalam bagaimana pemekaran Desa Persiapan Pucak Mulyo berkontribusi terhadap proses serta capaian pembangunan desa di wilayah Baosan Kidul, baik dari segi infrastruktur, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengidentifikasi perubahan signifikan yang terjadi setelah pemekaran.
3. Mengidentifikasi serta menganalisis berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa Persiapan Pucak Mulyo setelah pemekaran, termasuk faktor-faktor yang menghambat efektivitas pemerintahan dan pembangunan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan dan pembangunan desa, terutama dalam konteks pemekaran desa. Dengan mengkaji dampak pemekaran Desa

Persiapan Pucak Mulyo terhadap tata kelola pemerintahan lokal dan pembangunan desa, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang dinamika pemerintahan lokal di wilayah pedesaan serta menawarkan perspektif baru mengenai kebijakan pemekaran desa dalam konteks otonomi daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pemekaran desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan serta pembangunan di desa-desa yang baru dibentuk. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat membantu desa-desa persiapan lainnya dalam mengatasi tantangan yang serupa, serta menjadi pedoman bagi pengelolaan pemerintahan desa yang lebih baik di masa mendatang.

E. Definisi Konsep

Batasan konseptual adalah suatu penggambaran yang digunakan untuk memperjelas makna dan ruang lingkup dari konsep atau gagasan tertentu, yang diterapkan untuk fokus pada aspek relevan dalam suatu penelitian. Pada konteks penelitian ini, batasan konseptual diterapkan untuk menganalisis dampak pemekaran Desa Persiapan Pucak Mulyo terhadap tata kelola pemerintahan lokal dan pembangunan desa di Kecamatan Ngrayun.

Konsep "pemekaran desa" mengacu pada proses pembentukan desa baru dari desa induk, dengan tujuan meningkatkan kemandirian dan efisiensi dalam pengelolaan wilayah, pelayanan publik, dan pembangunan. Dalam kasus Desa Persiapan Pucak Mulyo, pemekaran ini bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar dalam urusan pemerintahan dan pembangunan.

Konsep "tata kelola pemerintahan lokal" meliputi struktur dan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah desa untuk menjalankan fungsinya, termasuk pengambilan keputusan, administrasi, serta

penyediaan layanan publik. Batasan ini mencakup efektivitas dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan desa baru dalam mengelola sumber daya dan menyusun kebijakan lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Konsep "pembangunan desa" di sini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini membatasi kajian pembangunan pada pengaruh pemekaran terhadap partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan, dan implementasi program-program desa di Desa Persiapan Pucak Mulyo.

Dengan demikian, definisi konsep dalam penelitian ini memfokuskan pada hubungan antara pemekaran desa dengan tata kelola pemerintahan lokal dan pembangunan desa sebagai objek kajian utama.

F. Landasan Kajian Teori

Dalam melakukan penelitian mengenai “Dampak Pemekaran Desa Persiapan Pucak Mulyo terhadap Tata Kelola Pemerintahan Lokal dan Pembangunan Desa di Kecamatan Ngrayun”, kerangka teori ini akan menjadi dasar dalam menganalisis dan memahami dinamika pemekaran desa dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan serta pembangunan desa.

1. Teori Pemekaran Wilayah (Regional Splitting)

Pemekaran desa merupakan salah satu bentuk dari desentralisasi dan pembagian wilayah administratif yang bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah. Menurut teori pemekaran wilayah, pemekaran dilakukan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. (Herawati, 2013) Dalam konteks Desa Persiapan Pucak Mulyo, pemekaran diharapkan mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang lebih terfokus dan mandiri.

Teori ini menekankan pentingnya pemenuhan syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Bupati Ponorogo 037 mengenai Pembentukan Desa Persiapan Pucak Mulyo di Kecamatan Ngrayun. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk memastikan pembentukan desa baru berjalan sesuai aturan. Berikut adalah rincian ruang lingkup tersebut:

- a. Pembentukan, jumlah penduduk, batas wilayah cakupan wilayah, dan pusat pemerintahan: Ini berkaitan dengan penentuan kriteria dasar dalam pembentukan desa, seperti jumlah penduduk yang memenuhi syarat minimal, batas wilayah yang jelas, serta lokasi pusat pemerintahan desa yang akan dibentuk.
- b. Struktur organisasi dan tugas perangkat desa persiapan: Ini mencakup bagaimana struktur organisasi pemerintahan desa dibentuk, serta tugas dan fungsi dari perangkat desa persiapan, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab.
- c. Pembinaan dan pengawasan: Desa persiapan akan mendapatkan pembinaan dari pihak-pihak terkait, serta pengawasan untuk memastikan desa tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peraturan ini bertujuan memastikan bahwa proses pemekaran desa berjalan tertib dan sesuai dengan regulasi yang ada, demi kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dimekarkan.

G. Defisi Operasional

1. Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Persiapan Pucak Mulyo terhadap Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

Dampak kebijakan pemekaran desa merujuk pada perubahan yang terjadi pada struktur organisasi, sumber daya manusia, dan mekanisme administrasi pemerintahan desa sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pemekaran. Dampak ini berkaitan erat dengan efektivitas tata kelola pemerintahan desa, yang mencakup sejauh mana pemerintah desa mampu melaksanakan fungsi administratif,

memberikan pelayanan publik, merencanakan dan mengelola anggaran, serta mengambil keputusan secara transparan dan akuntabel. Untuk mengukur dampak ini, digunakan beberapa indikator, yaitu peningkatan atau penurunan kualitas layanan publik, kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan administratif, peningkatan atau penurunan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan desa setelah pemekaran.

2. Kebijakan Pemekaran Desa Persiapan Pucak Mulyo Memengaruhi Proses dan Hasil Pembangunan Desa di Baosan Kidul

Kebijakan pemekaran desa merujuk pada keputusan administratif yang membagi Desa Persiapan Pucak Mulyo menjadi dua atau lebih wilayah administratif baru, dengan memindahkan sebagian wilayah dan sumber daya desa ke daerah lain. Kebijakan ini berimplikasi pada proses pembangunan desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi di tingkat desa. Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada hasil pembangunan desa, yang mencakup kondisi fisik, sosial, dan ekonomi yang tercapai setelah pelaksanaan proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan, fasilitas umum, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan pasca pemekaran, digunakan beberapa indikator, yaitu jumlah dan jenis proyek pembangunan yang berhasil dilaksanakan, kualitas infrastruktur yang dibangun (seperti jalan, air bersih, dan listrik), peningkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan.

2. Kendala dan Tantangan

yang Dihadapi dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Persiapan Pucak Mulyo Pasca Pemekaran merujuk pada berbagai hambatan yang menghalangi

tercapainya tujuan pemerintahan yang efektif dan pembangunan yang optimal setelah pemekaran desa, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, tantangan tersebut mencakup masalah dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan desa, koordinasi antar perangkat desa, dan penerapan kebijakan publik. Sementara itu, dalam pelaksanaan pembangunan, tantangan meliputi aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur serta pembangunan sektor sosial dan ekonomi di desa. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam menghadapi kendala ini, digunakan beberapa indikator, seperti jumlah dan jenis kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, tingkat kesulitan koordinasi antar pemerintah desa dan lembaga terkait, hambatan dalam pelaksanaan proyek pembangunan (termasuk keterbatasan anggaran, masalah teknis, atau konflik masyarakat), serta tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mengatasi kendala yang ada.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai dampak pemekaran Desa Persiapan Pucak Mulyo terhadap tata kelola pemerintahan lokal dan pembangunan desa. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif masyarakat, perangkat desa, dan tokoh lokal mengenai perubahan yang terjadi pasca pemekaran desa. Penjelasan mengenai metode penelitian dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam mengenai dampak pemekaran desa terhadap tata kelola pemerintahan lokal dan pembangunan desa. Penelitian ini

juga akan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Desa Persiapan Pucak Mulyo pasca pemekaran. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Desa Persiapan Pucak Mulyo, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya sebagai desa hasil pemekaran yang baru dibentuk. Peneliti akan melakukan pengumpulan data di berbagai titik dalam desa, termasuk kantor pemerintahan desa, lokasi proyek pembangunan, serta tempat-tempat umum yang menjadi pusat interaksi masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

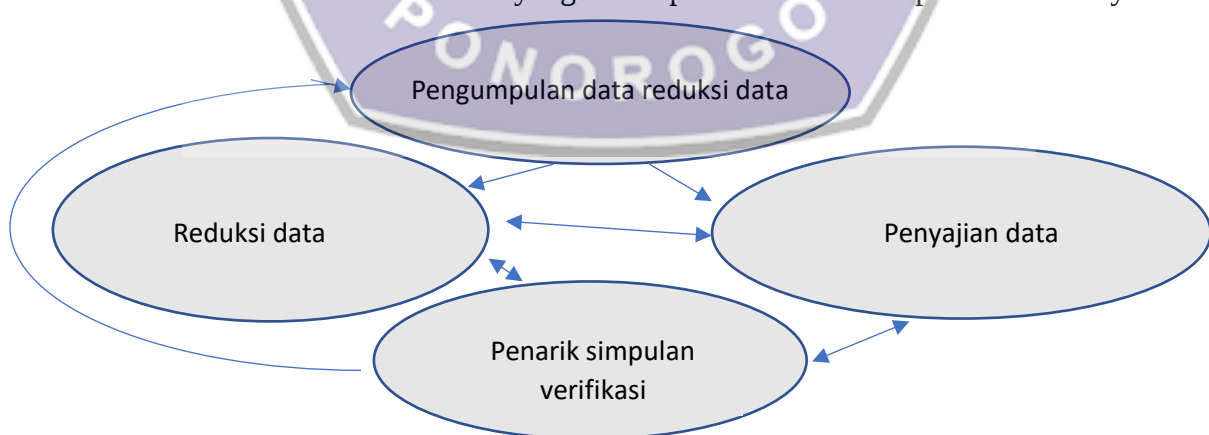
- a. Wawancara Mendalam: Peneliti akan melakukan wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga untuk menggali informasi mengenai dampak pemekaran desa. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi responden untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas.
- b. Observasi Partisipatif: Peneliti akan terlibat dalam kegiatan desa, seperti musyawarah desa dan program pembangunan, untuk mengamati dinamika sosial dan interaksi antar masyarakat.
- c. Analisis Dokumen: Peneliti juga akan menganalisis dokumen resmi seperti Peraturan Bupati, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan laporan-laporan pemerintahan yang relevan.

4. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menerapkan triangulasi data, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode. Selain itu, peneliti akan meminta konfirmasi dari responden tentang hasil wawancara dan observasi untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Proses ini juga akan melibatkan pengecekan silang antara data kualitatif yang dikumpulkan dengan data sekunder yang relevan.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis tematik. Proses analisis melibatkan pengkodean data, identifikasi tema-tema kunci, serta pengorganisasian informasi ke dalam kategori yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Peneliti akan mencari pola dan hubungan antara data untuk memahami dampak pemekaran desa terhadap tata kelola pemerintahan lokal dan pembangunan desa secara menyeluruh. Hasil analisis ini akan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan keberhasilan yang dihadapi oleh Desa Persiapan Pucak Mulyo.



Gambar 1. Skema Teknik Analisis Data Kualitatif Menurut Miles & Huberman